

Aktor Informal dalam *New Public Governance* Desa: Peran Kiai dalam Layanan Pengelolaan Sampah di Panempan, Pamekasan

*Mohammad Bustanol Husein¹⁾, Erina Saputri²⁾, Sukron Ma'mun³⁾, Saddam Husen⁴⁾, Naila Nur A Najwa⁵⁾

¹⁻⁵⁾Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia; inong@unira.ac.id, erina_saputri@unira.ac.id, sukron_ma'mun@unira.ac.id, saddamadja@gmail.com, naila_nur@gmail.com

Abstrak

Dalam tata kelola layanan publik desa, kajian sebelumnya lebih banyak menekankan kapasitas pemerintah, kelembagaan formal, dan mekanisme administratif, sementara peran aktor informal dengan sumber daya sosial masih belum banyak dijelaskan. Hal ini penting dalam layanan pengelolaan sampah karena keberlanjutan layanan tidak hanya bergantung pada kapasitas penyedia, tetapi juga penerimaan masyarakat sebagai pengguna. Dalam perspektif *New Public Governance*, layanan publik melibatkan keberagaman aktor (*multiple actors*), jaringan (*networks*), dan interaksi dalam penyelenggaraan layanan (*public service delivery*). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kiai sebagai aktor informal dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah di Desa Panempan, Pamekasan, khususnya dalam komunikasi dan penerimaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola layanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai tidak terlibat dalam pengambilan keputusan administratif, pengelolaan fasilitas, maupun operasional layanan. Perannya meliputi penyampai informasi, pemberi legitimasi sosial, dan mediator komunikasi melalui jaringan sosial-keagamaan, seperti pengajian. Temuan ini menunjukkan bahwa aktor informal dapat berkontribusi dalam *New Public Governance* melalui sumber daya sosial tanpa menggantikan fungsi institusi formal.

Kata Kunci: Aktor Informal; Desa; Kiai; Sampah

Abstract

In village public service governance, previous studies have largely emphasized government capacity, formal institutions, and administrative mechanisms, while the role of informal actors with social resources remains underexplored. This issue is particularly important in waste management services, as service sustainability depends not only on provider capacity but also on community acceptance as service users. From the perspective of *New Public Governance*, public services involve multiple actors, networks, and interactions in public service delivery. This study aims to analyze the role of kiai as an informal actor in waste management service governance in Panempan Village, Pamekasan, particularly in facilitating communication and community acceptance. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving village government officials, waste service managers, religious leaders, community leaders, and service users. The findings show that kiai are not involved in administrative decision-making, facility management, or waste service operations. Their roles include disseminating service information, providing social legitimacy, and mediating communication between the village government and the community through socio-religious networks, such as religious gatherings. These findings demonstrate that informal actors can contribute to *New Public Governance* through their social resources without replacing the functions of formal institutions.

Keywords: Informal Actors; Village; Kiai; Waste.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan layanan publik mengalami perubahan paradigma dari pendekatan *government* menuju *governance*. Dalam pendekatan tradisional, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Namun, perkembangan kajian administrasi publik menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik tidak selalu dapat dilakukan melalui mekanisme birokrasi secara mandiri. Permasalahan publik semakin membutuhkan keterlibatan aktor di luar struktur pemerintahan karena aktor tersebut memiliki sumber daya sosial yang dapat mendukung hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks layanan publik desa, sumber daya tersebut dapat berupa kedekatan sosial, pengetahuan lokal, dan akses komunikasi yang membantu proses penyampaian dan penerimaan layanan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan layanan publik tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi formal, tetapi juga oleh bagaimana berbagai aktor berinteraksi dalam proses penyediaan layanan (Osborne et al., 2021).

Salah satu bentuk layanan publik yang menunjukkan pentingnya keterlibatan aktor di luar institusi formal adalah pengelolaan sampah. Berbeda dengan layanan publik yang sebagian besar dapat diselenggarakan melalui prosedur administratif antara penyedia dan pengguna, pengelolaan sampah sangat bergantung pada perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat tidak hanya menerima layanan pengangkutan, tetapi juga perlu memahami informasi layanan, mengikuti mekanisme pengumpulan, membayar iuran, serta mengubah kebiasaan dalam membuang dan mengelola sampah. Karena itu, penyelenggaraan pengelolaan sampah membutuhkan proses komunikasi dan penerimaan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan antara pengelola layanan dan masyarakat (Ferronato & Torretta, 2019; Setiawan &

Rhama, 2021). Dalam kondisi tersebut, aktor informal yang memiliki kedekatan sosial dan akses komunikasi dengan masyarakat menjadi relevan untuk dikaji karena dapat menjadi bagian dari jaringan yang menghubungkan penyedia layanan dengan pengguna. Dalam masyarakat desa yang memiliki jaringan sosial dan keagamaan yang kuat, Salah satu aktor informal yang memiliki posisi penting dalam sebagian masyarakat desa di Indonesia adalah kiai atau tokoh agama (Husein & Saputri, 2019; Roziq & Husein, 2021). Posisi sosial kiai memungkinkan terbentuknya hubungan komunikasi yang relatif dekat dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan interaksi sosial. Dengan demikian, penting untuk melihat bukan hanya apakah kiai terlibat dalam pengelolaan sampah, tetapi bagaimana sumber daya sosial yang dimilikinya berfungsi dalam proses penyampaian dan penerimaan layanan publik.

Dalam masyarakat Madura, termasuk wilayah Pamekasan, kiai memiliki posisi sosial yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan hubungan sosial masyarakat. Kiai tidak hanya dikenal sebagai figur dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga sering menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial. Hubungan antara masyarakat dan kiai berkembang melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, dan aktivitas kemasyarakatan (Lubis & Rohmatillah, 2018; Zamroni, 2007). Namun, posisi kiai dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai pengganti pemerintah desa atau pengelola layanan publik. Kiai tidak memiliki kewenangan administratif dalam menetapkan kebijakan, mengelola organisasi layanan, maupun menjalankan operasional pengelolaan sampah. Sebaliknya, kiai dipahami sebagai aktor informal yang berada dalam jaringan tata kelola lokal dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui hubungan sosial yang telah terbentuk (Husein, 2018; Husein & Roziq, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai kiai di masyarakat Madura menunjukkan bahwa kiai

memiliki posisi sebagai pemimpin lokal informal dan memiliki pengaruh dalam proses pembangunan desa. Husein dan Roziq (2021), misalnya, menunjukkan bahwa kiai merupakan salah satu pemimpin lokal informal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan desa di Larangan Luar, Pamekasan. Di sisi lain, penelitian mengenai aktor keagamaan dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pemimpin agama dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat pada praktik pengelolaan sampah berbasis 3R (Novatsiani Pa Padjaja et al., 2021). Namun, kedua kelompok penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana otoritas sosial kiai sebagai aktor informal berfungsi dalam jaringan tata kelola layanan publik desa, khususnya dalam hubungan antara pemerintah desa, pengelola layanan, dan masyarakat pengguna. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis posisi dan peran kiai dalam tata kelola layanan publik pengelolaan sampah melalui perspektif *New Public Governance*. Sebagian penelitian mengenai layanan publik desa lebih banyak menekankan aspek kapasitas pemerintah, efektivitas organisasi, desain kelembagaan, dan mekanisme formal penyelenggaraan layanan (Prasojo & Kurniawan, 2008; Rohman & Bagus, 2026). Pendekatan tersebut memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana aktor di luar struktur pemerintahan ikut memengaruhi proses penerimaan dan pelaksanaan layanan publik.

Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan merupakan desa yang menarik untuk dikaji dalam konteks *collaborative governance* dalam pengelolaan layanan publik, khususnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Desa ini memiliki karakteristik sosial masyarakat yang kuat dengan keterlibatan berbagai aktor lokal, seperti pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Delta Mulia, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat

pengguna layanan. Pengelolaan sampah di Desa Panempan dilakukan melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang berada di bawah pengelolaan BUMDes Delta Mulia. Keberadaan TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai layanan kebersihan, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola ekonomi desa melalui pengelolaan iuran masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan desa. Menurut keterangan Camat Kecamatan Pamekasan, pengelolaan TPS3R merupakan bagian dari program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui proses pemilahan dan pengurangan timbulan sampah (Informan I-01, Wawancara, 2026).

Sebelum adanya TPS3R, persoalan utama pengelolaan sampah di Desa Panempan berkaitan dengan rendahnya sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah secara tidak teratur, termasuk membuang sampah ke sungai dan melakukan pembakaran sampah. Ketua RW Desa Panempan menjelaskan bahwa sebelum TPS3R terbentuk, masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan, namun setelah adanya layanan pengangkutan sampah dari TPS3R kondisi lingkungan menjadi lebih bersih karena setiap rumah telah memiliki tempat sampah dan sampah diangkut secara rutin. Hal yang sama disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan bahwa sebelum adanya TPS3R banyak warga yang membuang sampah ke sungai, sedangkan setelah adanya BUMDes Delta Mulia masyarakat lebih mudah mengelola sampah karena tersedia layanan pengangkutan secara berkala.

Keberadaan TPS3R di Desa Panempan menunjukkan perkembangan layanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang cukup luas. Berdasarkan data pengelola layanan, TPS3R melalui BUMDes Delta Mulia tidak hanya melayani rumah tangga di Desa Panempan, tetapi juga memiliki jaringan pelanggan mitra. Jumlah pelanggan tercatat sebanyak 749 pengguna yang terdiri dari 152 pelanggan Dusun Taman, 104 pelanggan Dusun

Cangkren, 102 pelanggan Dusun Panyepen, dan 391 pelanggan mitra. Data tersebut menunjukkan bahwa TPS3R telah berkembang menjadi layanan publik desa yang memiliki jangkauan pelayanan di luar kebutuhan internal desa. Besarnya cakupan layanan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan TPS3R tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis pengelola, tetapi juga pada kemampuan membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berbeda dengan layanan publik yang dapat berjalan melalui hubungan administratif antara pemerintah dan warga, pengelolaan sampah membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, seperti kesediaan menggunakan layanan, mengikuti mekanisme pengumpulan, dan meninggalkan praktik pembuangan sampah sebelumnya. Dalam konteks inilah keberadaan aktor informal seperti kiai menjadi penting untuk dikaji karena memiliki jaringan sosial yang dapat menjadi saluran komunikasi antara institusi formal dan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan sampah di Desa Panempan tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat, keberlanjutan layanan publik, dan penguatan ekonomi desa. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, peningkatan risiko kesehatan masyarakat, serta menambah beban kapasitas TPA. Camat Kecamatan Pamekasan menjelaskan bahwa tujuan pembentukan TPS3R adalah agar sampah dari masyarakat tidak seluruhnya dikirim ke TPA, tetapi terlebih dahulu dipilah dan dikelola melalui prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Selain menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, TPS3R juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja lokal serta kontribusi terhadap pendapatan desa.

Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, keberhasilan TPS3R Panempan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa dan BUMDes sebagai aktor formal, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan aktor informal dalam

struktur sosial masyarakat. Kiai dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting karena memiliki hubungan sosial dan tingkat kepercayaan yang kuat di masyarakat. Keterlibatan kiai dalam pengelolaan sampah bukan sebagai pengelola operasional TPS3R, tetapi melalui peran sosial dalam menyampaikan informasi, memberikan contoh partisipasi, serta membantu membangun penerimaan masyarakat terhadap program desa. Tokoh agama di Desa Panempan menyampaikan bahwa dirinya dilibatkan dalam musyawarah desa dan membantu menyosialisasikan perkembangan desa kepada masyarakat melalui pengajian. Dengan demikian, keberadaan kiai menunjukkan bahwa layanan publik desa tidak hanya berjalan melalui mekanisme formal pemerintahan, tetapi juga melalui jaringan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji fenomena tersebut. Desa ini memiliki layanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan pemerintah desa, pengelola layanan, dan masyarakat pengguna (Hidayat & Warsono, 2020; Rika Syahadatina et al., 2023). Dalam proses penyelenggaraan layanan tersebut, terdapat keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hubungan sosial masyarakat desa. Keterlibatan kiai dalam konteks Desa Panempan menarik untuk dikaji bukan karena kiai menjadi pengelola layanan sampah, tetapi karena keberadaannya menunjukkan adanya aktor informal yang berada dalam jaringan layanan publik desa. Kiai menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat kebijakan publik diperkenalkan, dikomunikasikan, dan diterima oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa layanan publik desa dapat dipahami melalui hubungan antara institusi formal dan aktor sosial yang berada di luar struktur pemerintahan (Rohman & Bagus, 2026; Setiawan & Rhama, 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktor informal dalam tata kelola layanan publik desa, khususnya

bagaimana kiai terlibat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Panempan, Pamekasan. Dengan menggunakan perspektif *New Public Governance* (Stephen Osborne, 2010), penelitian ini menganalisis tiga aspek utama, yaitu keberagaman aktor (*multiple actors*), jaringan hubungan antaraktor (*networks*), dan penyelenggaraan layanan publik (*public service delivery*). Penelitian ini berkontribusi pada kajian administrasi publik dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana layanan publik desa tidak hanya berjalan melalui institusi formal, tetapi juga melalui keterlibatan aktor informal yang berada dalam jaringan sosial masyarakat. Studi ini menunjukkan pentingnya melihat aktor lokal sebagai bagian dari proses *governance* dalam penyelenggaraan layanan publik tingkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

New Public Governance (NPG) digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana layanan publik terbentuk melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki sumber daya berbeda dan terhubung melalui jaringan. Stephen Osborne (2010) menempatkan *governance* dalam konteks hubungan antaraktor dan proses interaksi yang membentuk penyelenggaraan layanan publik. Dengan kerangka tersebut, analisis tidak berhenti pada identifikasi siapa yang terlibat, tetapi melihat sumber daya yang dibawa setiap aktor, hubungan yang menghubungkan mereka, serta bagaimana hubungan tersebut berhubungan dengan proses *public service delivery*.

Dalam penelitian ini, NPG dioperasionalkan melalui tiga konsep yang saling berhubungan, yaitu *multiple actors*, *networks*, dan *public service delivery*. *Multiple actors* digunakan untuk mengidentifikasi aktor formal dan informal yang berada dalam lingkungan layanan pengelolaan sampah. *Networks* digunakan untuk menganalisis hubungan dan mekanisme komunikasi yang memungkinkan sumber daya tersebut bergerak antaraktor. Sementara itu, *public service delivery* digunakan untuk melihat bagaimana interaksi dan jaringan

tersebut berkaitan dengan proses penyampaian dan penerimaan layanan.

Aktor Informal

Aktor informal dalam penelitian ini dipahami sebagai individu atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan administratif dalam struktur pemerintahan, tetapi memiliki sumber daya sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi dan memengaruhi hubungan antara institusi formal dengan masyarakat. Posisi informal tidak berarti tidak memiliki pengaruh. Sebaliknya, pengaruh dapat berasal dari hubungan sosial, kepercayaan, pengetahuan lokal, reputasi, jaringan komunitas, maupun kedekatan dengan kelompok masyarakat tertentu.

Konsep tersebut penting karena sumber daya dalam tata kelola tidak hanya berupa kewenangan administratif, anggaran, atau fasilitas organisasi. Aktor informal dapat membawa *social resources* yang berbeda dari sumber daya pemerintah. *Social resources* tersebut dapat berupa akses terhadap jaringan masyarakat, kemampuan komunikasi, hubungan kepercayaan, dan legitimasi sosial. Dalam perspektif NPG, perbedaan sumber daya tersebut menjadi relevan karena layanan publik berlangsung melalui interaksi aktor yang tidak memiliki kapasitas dan posisi yang sama.

Dalam penelitian ini, kiai dikonseptualisasikan sebagai aktor informal yang memiliki *social authority*. *Social authority* merujuk pada posisi sosial yang memungkinkan seseorang memperoleh kepercayaan, pengakuan, dan akses komunikasi dalam suatu komunitas. Dengan demikian, kiai tidak diposisikan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai aktor yang memiliki sumber daya sosial tertentu dalam jaringan masyarakat lokal. Otoritas tersebut tidak berupa kewenangan formal untuk membuat kebijakan atau mengelola layanan, tetapi berupa kapasitas sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi rujukan dalam komunikasi sosial.

Konseptualisasi ini penting untuk membedakan fungsi kiai dari fungsi pemerintah desa dan pengelola TPS3R. Pemerintah desa

memiliki kewenangan administratif, sedangkan pengelola TPS3R memiliki tanggung jawab operasional. Kiai tidak menjalankan kedua fungsi tersebut. Posisi kiai dianalisis berdasarkan social resources yang dimilikinya dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam hubungan dengan aktor formal dan masyarakat.

Multiple Actors dan Different Resources

Konsep *multiple actors* digunakan untuk melihat keberagaman aktor yang berada dalam lingkungan layanan publik. Dalam pengelolaan sampah di Desa Panempan, aktor tidak hanya terdiri dari pemerintah desa dan pengelola TPS3R, tetapi juga mencakup kiai, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Keberadaan berbagai aktor tersebut tidak berarti bahwa seluruh aktor memiliki fungsi yang sama. Justru perbedaan posisi dan sumber daya menjadi bagian penting dalam analisis. Pemerintah desa memiliki kewenangan administratif dan legitimasi kelembagaan. Pengelola TPS3R memiliki kapasitas teknis dan operasional. Masyarakat memiliki pengalaman sebagai pengguna layanan sekaligus pengetahuan mengenai kebutuhan di tingkat lokal. Sementara itu, kiai memiliki *social authority* dan jaringan sosial-keagamaan yang memungkinkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antaraktor dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan prinsip *different resources*. Pertanyaan analitisnya bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi sumber daya apa yang dimiliki setiap aktor dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam proses layanan. Kerangka ini memungkinkan posisi kiai dipahami secara lebih spesifik, yaitu sebagai aktor yang membawa sumber daya sosial ke dalam jaringan layanan publik tanpa memiliki kewenangan administratif.

Networks sebagai Mekanisme Tata Kelola

Networks dalam NPG digunakan untuk menjelaskan mekanisme yang menghubungkan aktor-aktor dengan sumber daya yang berbeda. Jaringan tidak hanya dipahami sebagai struktur hubungan formal antarorganisasi, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang memungkinkan

informasi, dukungan, kepercayaan, dan sumber daya lainnya bergerak di antara aktor.

Dalam layanan pengelolaan sampah desa, jaringan menjadi penting karena informasi mengenai layanan harus dapat mencapai masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah desa dapat memiliki kewenangan untuk memperkenalkan program, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berlangsung melalui lebih dari satu saluran. Dalam konteks penelitian ini, hubungan pemerintah desa dengan kiai menjadi salah satu bentuk hubungan sosial yang perlu dianalisis karena kiai memiliki akses komunikasi melalui jaringan sosial dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, *network* dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme penghubung antara pemerintah desa, pengelola layanan, kiai, dan masyarakat. Analisis diarahkan pada bagaimana informasi disampaikan, siapa yang menjadi penghubung, melalui ruang sosial apa komunikasi berlangsung, dan bagaimana hubungan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai layanan pengelolaan sampah.

Public Service Delivery

Konsep *public service delivery* digunakan untuk menganalisis tahap ketika hubungan antaraktor dan jaringan diterjemahkan ke dalam proses penyampaian layanan kepada masyarakat. Dalam NPG, layanan publik tidak dipahami semata-mata sebagai produk yang diberikan oleh pemerintah, tetapi sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan (Stephen Osborne, 2010).

Pengelolaan sampah merupakan konteks yang relevan karena keberlangsungan layanan tidak hanya bergantung pada keberadaan pengelola dan fasilitas pengangkutan. Masyarakat perlu mengetahui layanan yang tersedia, memahami mekanisme pelayanan, dan bersedia menggunakan sistem yang telah dibangun. Karena itu, komunikasi dan penerimaan masyarakat menjadi bagian dari proses *public service delivery*.

Dalam penelitian ini, *public service delivery* tidak digunakan untuk mengukur efektivitas layanan secara kuantitatif. Konsep ini digunakan untuk membaca bagaimana jaringan antaraktor berkaitan dengan proses penyampaian informasi, penerimaan masyarakat, dan penggunaan layanan pengelolaan sampah. Batasan ini penting agar analisis tidak menghasilkan klaim bahwa keterlibatan kiai secara langsung meningkatkan efektivitas layanan apabila data penelitian tidak mengukur hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami proses sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan publik desa, khususnya bagaimana aktor informal terlibat dalam hubungan tata kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Creswell & David Creswell, 2018). Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran tingkat keberhasilan layanan sampah secara kuantitatif, tetapi berusaha memahami bagaimana hubungan antaraktor terbentuk, bagaimana komunikasi berlangsung, dan bagaimana aktor di luar struktur pemerintahan formal berkontribusi dalam proses layanan publik.

Penelitian dilakukan di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari–September 2026. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada Maret–April 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Desa Panempan sebagai wilayah yang memiliki layanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain keberadaan layanan tersebut, desa ini juga memiliki struktur sosial masyarakat yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pengguna layanan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang

diteliti. Penelitian ini melibatkan 10 informan yang terdiri dari:

Tabel 1. Detail Informan

Kelompok Informan	Jumlah	Fokus Informasi
Kepala Desa/perangkat desa	2 orang	kebijakan layanan, hubungan pemerintah desa dengan aktor masyarakat
Kiai/tokoh agama	1 orang	posisi sosial, keterlibatan dalam komunikasi masyarakat
Pengelola TPS3R/BUMDes	2 orang	pelaksanaan layanan dan hubungan dengan masyarakat
Ketua RT/RW/tokoh masyarakat	2 orang	komunikasi sosial dan penerimaan masyarakat
Tokoh pemuda	1 orang	pandangan masyarakat terhadap layanan
Masyarakat pengguna layanan	2 orang	pengalaman menggunakan layanan sampah

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan kiai sebagai kelompok, tetapi memahami posisi kiai sebagai aktor sosial dalam satu kasus layanan publik tertentu. Oleh karena itu, satu informan kiai dipilih berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan konteks komunikasi masyarakat di Desa Panempan. Perspektif tersebut kemudian ditriangulasi dengan informasi dari pemerintah desa, pengelola layanan, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta hubungan antaraktor dalam penyelenggaraan layanan pengelolaan sampah desa. Fokus wawancara disusun berdasarkan perspektif *New Public Governance* yang meliputi *multiple actors* untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan

bentuk kontribusinya, *networks* untuk memahami hubungan serta mekanisme komunikasi antara pemerintah desa, aktor informal, dan masyarakat, serta *public service delivery* untuk memahami proses penyelenggaraan layanan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen pemerintah desa, dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah, dan arsip kegiatan masyarakat yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis* melalui tahapan transkripsi dan pemahaman data, proses *coding*, pengelompokan kode menjadi tema, serta interpretasi temuan berdasarkan tiga aspek *New Public Governance*, yaitu keterlibatan aktor (*multiple actors*), hubungan antaraktor (*networks*), dan penyelenggaraan layanan publik (*public service delivery*) (Nowell et al., 2017). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, tokoh agama, pengelola layanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna layanan, serta membandingkan hasil wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan temuan penelitian menggambarkan kondisi empiris mengenai keterlibatan aktor informal dalam tata kelola layanan publik pengelolaan sampah di Desa Panempan.

HASIL PENELITIAN

Keberadaan Aktor Informal dalam Tata Kelola Layanan Publik Desa

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelolaan sampah di Desa Panempan dijalankan melalui peran beberapa pihak dengan fungsi yang berbeda. Pemerintah Desa Panempan berperan dalam memberikan dukungan kelembagaan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kepada masyarakat. Pengelola layanan sampah/BUMDes Delta Mulia menjalankan fungsi operasional, termasuk pengelolaan layanan pengangkutan dan aktivitas teknis TPS3R. Sementara itu, kiai atau tokoh agama yang berada di lingkungan sosial masyarakat berperan dalam aspek komunikasi

sosial melalui penyampaian informasi dan dukungan terhadap program desa. Pemerintah desa menjadi aktor formal yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program layanan publik, sedangkan pengelola layanan sampah menjalankan fungsi teknis pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, terdapat aktor informal yang berada di luar struktur pemerintahan, salah satunya adalah kiai atau tokoh agama yang memiliki hubungan sosial dengan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan kiai dalam konteks pengelolaan sampah tidak berkaitan dengan fungsi administratif maupun operasional layanan. Kiai tidak terlibat dalam pengaturan teknis pengangkutan sampah, pengelolaan fasilitas, maupun pengambilan keputusan organisasi layanan. Keterlibatan kiai lebih terlihat dalam hubungan sosial masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi dan memberikan dukungan terhadap program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kepala Desa Panempan menjelaskan bahwa tokoh agama merupakan salah satu pihak yang sering dilibatkan ketika pemerintah desa ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnyanya:

"Kalau ada kegiatan sosial atau program desa, kita biasanya berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan kiai. Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah menyampaikan informasi."
(Informan I-04)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menggunakan mekanisme administratif dalam menyampaikan program publik, tetapi juga memanfaatkan hubungan sosial yang telah berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, kiai menjadi salah satu aktor yang berada dalam lingkungan sosial masyarakat dan dapat membantu memperluas penyampaian informasi.

Hal serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa masyarakat desa masih memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh agama. Menurut informan:

"Masyarakat di sini masih menghormati kiai. Kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh kiai biasanya lebih mudah diterima karena masyarakat sudah mengenal beliau." (Informan I-06)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa posisi sosial kiai menjadi bagian dari struktur hubungan masyarakat desa. Kiai tidak memiliki kewenangan formal dalam pemerintahan, tetapi memiliki kedekatan sosial yang membuatnya menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menerima informasi mengenai berbagai kegiatan sosial. Selain itu, tokoh agama yang menjadi informan penelitian menjelaskan bahwa keterlibatan dirinya dalam kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan melalui penyampaian pesan sosial. Ia menyampaikan:

"Kalau ada program yang baik untuk masyarakat, biasanya kita ikut menyampaikan. Bukan berarti kita mengatur, tetapi membantu agar masyarakat memahami maksud dari program tersebut." (Informan I-07)

Temuan dari ketiga sumber informasi menunjukkan adanya batas yang jelas dalam keterlibatan kiai pada layanan publik pengelolaan sampah di Desa Panempen. Berdasarkan keterangan pemerintah desa, kiai tidak terlibat dalam pengambilan keputusan administratif maupun pengelolaan teknis layanan, tetapi dilibatkan sebagai pihak yang membantu menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Perspektif masyarakat juga menunjukkan bahwa posisi kiai lebih berkaitan dengan hubungan kepercayaan dan kedekatan sosial, bukan sebagai pengelola layanan. Sementara itu, keterangan kiai menegaskan bahwa keterlibatannya dilakukan dalam bentuk penyampaian pesan sosial dan dukungan terhadap program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan dalam bentuk pengaturan atau pengambilan keputusan. Dengan demikian, kiai berada pada posisi sebagai aktor informal yang memiliki *social authority* dalam jaringan layanan publik, sedangkan kewenangan administratif dan fungsi operasional

tetap berada pada pemerintah desa dan pengelola layanan.



Gambar 1. Aktivitas Pengajian Masyarakat sebagai Media Interaksi Sosial Kiai dengan Warga Desa Panempen

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pengajian masyarakat yang menjadi salah satu ruang interaksi sosial antara kiai dan masyarakat Desa Panempen. Ruang sosial tersebut menjadi bagian dari jaringan komunikasi informal yang memungkinkan penyampaian informasi dan penguatan hubungan antara aktor lokal dengan masyarakat.

Jaringan Hubungan Antaraktor dalam Penyampaian Layanan Publik



Gambar 2. Jaringan Aktor dalam Tata Kelola Layanan Pengelolaan Sampah Desa Panempen

Gambar 2 menunjukkan pola jaringan aktor dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah Desa Panempen berdasarkan perspektif *New Public Governance* (NPG). Diagram menggambarkan bahwa penyelenggaraan layanan publik tidak hanya berlangsung melalui satu institusi formal, tetapi

melalui hubungan antaraktor yang memiliki peran dan sumber daya berbeda.

Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan antaraktor dalam pengelolaan sampah Desa Panempan berlangsung melalui jaringan formal dan informal. Pemerintah desa menggunakan mekanisme formal seperti rapat desa dan penyampaian informasi melalui perangkat desa, tetapi dalam praktiknya komunikasi juga berlangsung melalui hubungan sosial yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ruang sosial yang ditemukan dalam penelitian adalah kegiatan pengajian dan pertemuan masyarakat. Kegiatan tersebut tidak secara khusus dibentuk sebagai forum layanan publik, tetapi menjadi ruang komunikasi yang telah rutin digunakan oleh masyarakat. Melalui ruang sosial tersebut, informasi mengenai program desa dapat disampaikan kepada masyarakat.

Kepala Desa Panempan menjelaskan:

"Kalau sosialisasi tidak usah mengeluarkan biaya di balai, langsung saja minta mic ke kiai saat pengajian mau sosialisasi masalah sosial. Karena hampir setiap malam ada kegiatan pengajian." (Informan I-04)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat menjadi salah satu saluran komunikasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik. Pemerintah desa tetap memiliki kewenangan sebagai penyelenggara layanan, tetapi penyampaian informasi dapat dilakukan melalui ruang sosial yang telah berjalan dalam masyarakat. Ketua RT juga menjelaskan bahwa kegiatan masyarakat menjadi salah satu media yang membantu penyebaran informasi mengenai program lingkungan. Menurutnya:

"Kalau ada informasi dari desa biasanya disampaikan lewat pertemuan warga, kadang juga melalui kegiatan pengajian. Jadi masyarakat yang tidak hadir di kantor desa tetap bisa mengetahui informasi." (Informan I-05)

Data tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi layanan publik tidak hanya berlangsung melalui satu jalur administratif.

Informasi bergerak melalui berbagai hubungan sosial yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Dalam konteks pengelolaan sampah, jaringan tersebut berkaitan dengan upaya menyampaikan informasi mengenai keberadaan layanan, aturan penggunaan, dan pentingnya keterlibatan masyarakat. Pengelola layanan sampah menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap layanan membutuhkan proses komunikasi yang dilakukan secara berulang. Salah satu pengelola layanan menyampaikan:

"Awalnya masyarakat perlu diberi pemahaman dulu. Tidak semua langsung mengikuti karena sebelumnya mereka sudah punya kebiasaan sendiri dalam membuang sampah." (Informan I-02)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa layanan publik membutuhkan proses komunikasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hubungan antaraktor menjadi bagian dari proses memperkenalkan dan menjalankan layanan di tingkat desa.

Peran Aktor Informal dalam Proses *Public Service Delivery*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor informal dalam layanan publik pengelolaan sampah berada pada aspek sosial dan komunikasi masyarakat. Kiai tidak menjadi bagian dari struktur pengelola layanan, tetapi keberadaannya berhubungan dengan proses penerimaan masyarakat terhadap program yang diselenggarakan pemerintah desa. Masyarakat pengguna layanan menjelaskan bahwa informasi mengenai program sampah tidak hanya diperoleh melalui petugas layanan, tetapi juga melalui lingkungan sosial mereka. Salah satu masyarakat menyampaikan:

"Kami mengetahui program ini dari informasi desa dan juga dari orang-orang sekitar. Kalau sudah banyak yang mengetahui, masyarakat lebih mudah mengikuti." (Informan I-09)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan publik tidak hanya terjadi ketika

layanan diberikan kepada masyarakat, tetapi juga melalui proses sebelum layanan digunakan, yaitu penyampaian informasi dan pembentukan pemahaman masyarakat. Tokoh pemuda juga menjelaskan bahwa keberadaan tokoh lokal membantu proses komunikasi dengan masyarakat. Ia menyampaikan:

"Tokoh masyarakat dan kiai biasanya lebih mengetahui kondisi warga. Jadi kalau ada informasi yang perlu disampaikan, mereka bisa membantu menyampaikan kepada masyarakat." (Informan I-08)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktor informal memiliki posisi dalam proses layanan publik melalui kapasitas komunikasi sosial. Keterlibatan mereka bukan dalam bentuk pengelolaan layanan secara langsung, melainkan melalui hubungan dengan masyarakat yang membantu proses penyampaian informasi. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat menjadi bagian penting karena layanan tersebut membutuhkan penggunaan secara aktif oleh warga. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sebagian warga mulai mengikuti layanan setelah memperoleh informasi dan memahami manfaat program. Salah satu pengguna layanan menyampaikan:

"Kalau sudah dijelaskan dan tahu manfaatnya, masyarakat lebih mudah menerima. Yang penting ada informasi yang jelas." (Informan I-10)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap layanan publik berkaitan dengan proses komunikasi yang berlangsung antara penyedia layanan dan pengguna. Berdasarkan temuan tersebut, peran kiai dalam *public service delivery* dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap proses penerimaan layanan (*service acceptance*), bukan sebagai penyelenggara layanan. Kiai tidak menentukan kebijakan, mengelola fasilitas, atau menjalankan operasional TPS3R, tetapi membantu membangun hubungan komunikasi dan kepercayaan yang mendukung interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

Dengan demikian, keterlibatan aktor informal dalam layanan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa proses pelayanan publik desa berlangsung melalui kombinasi sumber daya yang berbeda. Pemerintah desa menyediakan kewenangan formal, BUMDes menyediakan kapasitas teknis, sedangkan kiai menyediakan *social authority* yang mendukung proses komunikasi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan. Pola tersebut menunjukkan karakter *New Public Governance*, yaitu layanan publik terbentuk melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki peran dan sumber daya berbeda.

Hubungan Pemerintah Desa dan Aktor Informal dalam Tata Kelola Layanan Publik

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan kiai berlangsung dalam bentuk hubungan sosial, bukan hubungan struktural. Pemerintah desa tetap menjadi institusi yang memiliki kewenangan formal dalam penyelenggaraan layanan publik, sedangkan kiai berada pada posisi sebagai aktor masyarakat yang memiliki hubungan sosial dengan warga. Kepala Desa Panempan menjelaskan bahwa hubungan dengan tokoh agama dibangun melalui komunikasi dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. Menurutnya:

"Kita tidak memberikan kewenangan kepada kiai untuk mengelola program, tetapi kita meminta bantuan untuk menyampaikan kepada masyarakat karena mereka dekat dengan warga." (Informan I-04)

Pernyataan tersebut memperjelas batas hubungan antara institusi formal dan aktor informal. Pemerintah desa tetap menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan, sementara aktor informal membantu melalui hubungan sosial yang dimilikinya. Pengelola layanan sampah juga menjelaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pelayanan. Menurut informan:

"Pengelola hanya menyediakan layanan, tetapi masyarakat yang menentukan apakah layanan ini digunakan atau tidak." (Informan I-02)

Data lapangan menunjukkan bahwa tata kelola layanan publik desa berlangsung melalui keterlibatan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda. Pemerintah desa menjalankan peran formal sebagai penyelenggara layanan, pengelola sampah menjalankan fungsi operasional, sedangkan kiai dan tokoh masyarakat berada dalam jaringan sosial yang mendukung proses komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan aktor informal menjadi bagian dari praktik tata kelola layanan publik di Desa Panempan. Keterlibatan kiai tidak berada pada aspek pengelolaan administratif, tetapi melalui hubungan sosial yang membantu proses penyampaian informasi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan publik pengelolaan sampah di Desa Panempan tidak berlangsung hanya melalui mekanisme organisasi formal, tetapi juga melalui keterlibatan aktor informal yang berada dalam lingkungan sosial masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktor informal dalam tata kelola layanan publik desa tidak selalu berbentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan fungsi administratif, tetapi dapat berlangsung melalui pemanfaatan sumber daya sosial yang dimiliki aktor tersebut. Dalam konteks Desa Panempan, kiai berperan melalui *social authority* berupa kepercayaan masyarakat, kedekatan sosial, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan proses penyampaian informasi serta penerimaan layanan publik berlangsung lebih efektif. Namun, posisi tersebut tetap berada di luar struktur administratif pemerintahan desa.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *New Public Governance* (NPG) dengan menunjukkan bahwa jaringan dalam penyelenggaraan layanan publik desa tidak hanya terbentuk melalui hubungan antarorganisasi formal, tetapi juga melalui hubungan sosial yang dimiliki oleh aktor informal. Stephen Osborne (2010)

menjelaskan bahwa layanan publik modern terbentuk melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kapasitas berbeda. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan sumber daya tersebut terlihat dari pemerintah desa yang memiliki kewenangan formal, BUMDes Delta Mulia yang memiliki kapasitas teknis operasional, serta kiai yang memiliki *social authority* berupa hubungan kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat.

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian NPG dengan menunjukkan bahwa aktor informal dapat menjadi bagian dari mekanisme *governance* meskipun tidak memiliki kewenangan administratif maupun tanggung jawab operasional dalam layanan publik. Keberadaan kiai memperlihatkan bahwa jaringan layanan publik di tingkat desa tidak hanya bekerja melalui koordinasi kelembagaan formal, tetapi juga melalui jaringan sosial yang memungkinkan informasi, kepercayaan, dan dukungan sosial bergerak antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya perspektif NPG dengan menunjukkan bahwa *network governance* pada konteks masyarakat desa dapat memiliki karakter berbasis relasi sosial (*socially embedded networks*), di mana otoritas sosial aktor informal menjadi sumber daya yang melengkapi kapasitas institusi formal dalam proses *public service delivery*. Temuan ini menegaskan bahwa analisis layanan publik desa perlu memperhatikan bukan hanya struktur formal pemerintahan, tetapi juga hubungan sosial yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap layanan.

Dalam konteks Desa Panempan, keberadaan kiai memperlihatkan bahwa aktor informal dapat menjadi bagian dari proses tata kelola layanan publik. Kiai tidak memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan sampah, tetapi memiliki posisi sosial yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan kiai perlu dipahami sebagai bentuk kontribusi aktor

non-pemerintah dalam jaringan layanan publik, bukan sebagai pengganti fungsi pemerintah desa.

Multiple Actors: Layanan Publik Desa melalui Keterlibatan Berbagai Aktor

Salah satu gagasan utama dalam *New Public Governance* adalah bahwa layanan publik melibatkan banyak aktor (*multiple actors*). Stephen Osborne (2010) menjelaskan bahwa layanan publik tidak lagi dipahami sebagai hasil kerja satu organisasi pemerintah, melainkan sebagai proses yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda. Temuan penelitian di Desa Panempan memperlihatkan keberadaan beberapa aktor dalam penyelenggaraan layanan sampah, yaitu pemerintah desa, pengelola layanan, masyarakat pengguna, serta kiai sebagai aktor informal. Masing-masing aktor memiliki fungsi yang berbeda. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program, pengelola layanan menjalankan aktivitas operasional, masyarakat menjadi pengguna layanan, sedangkan kiai berada pada posisi sosial yang membantu komunikasi dengan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Stephen Osborne (2010) bahwa tata kelola publik tidak hanya bergantung pada kapasitas organisasi pemerintah, tetapi juga pada kemampuan mengelola hubungan dengan aktor lain yang berada dalam lingkungan pelayanan. Dalam kasus Panempan, keberadaan kiai menunjukkan bahwa aktor yang tidak memiliki kewenangan administratif tetap dapat memiliki kontribusi dalam proses pelayanan publik melalui sumber daya sosial yang dimilikinya. Namun, keterlibatan aktor informal perlu dipahami secara proporsional. Penelitian ini tidak menemukan bahwa kiai mengambil alih fungsi pemerintah desa atau menjadi pengelola utama layanan sampah. Peran kiai berada pada ruang sosial, terutama dalam membantu penyampaian informasi dan mendukung penerimaan masyarakat terhadap program layanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *New Public Governance*, keberagaman aktor tidak berarti seluruh aktor

memiliki posisi yang sama. Setiap aktor memiliki kapasitas dan fungsi yang berbeda dalam sistem layanan publik. Pemerintah memiliki legitimasi administratif, sementara aktor informal memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat.

Aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah di Desa Panempan memiliki fungsi yang berbeda karena masing-masing memiliki sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda. Pemerintah desa memiliki sumber daya berupa kewenangan formal dan legitimasi kelembagaan sehingga berperan dalam perencanaan, fasilitasi, dan koordinasi program layanan. BUMDes Delta Mulia memiliki kapasitas teknis dan operasional sehingga menjalankan fungsi pengelolaan layanan TPS3R, termasuk aspek pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki posisi sebagai pengguna layanan yang menentukan keberlangsungan program melalui penerimaan, partisipasi, dan penggunaan layanan. Sementara itu, kiai sebagai aktor informal tidak memiliki kewenangan administratif maupun tanggung jawab operasional, tetapi memiliki *social resources* berupa hubungan kepercayaan, kedekatan sosial, dan jaringan komunikasi dengan masyarakat. Perbedaan sumber daya tersebut menyebabkan setiap aktor menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses *public service delivery*. Dalam perspektif *New Public Governance*, keberagaman fungsi tersebut menunjukkan bahwa layanan publik tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan terbentuk melalui interaksi aktor dengan kapasitas dan sumber daya yang beragam.

Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap aktor membentuk pola kontribusi yang berbeda dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah di Desa Panempan. Pemerintah desa berkontribusi melalui sumber daya kelembagaan berupa kewenangan formal, legitimasi kebijakan, dan kemampuan koordinasi yang memungkinkan program layanan dirancang serta diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. BUMDes Delta Mulia

berkontribusi melalui sumber daya teknis dan operasional yang mendukung pelaksanaan layanan, seperti pengelolaan TPS3R dan penyelenggaraan aktivitas pelayanan sampah. Masyarakat berkontribusi melalui sumber daya partisipatif berupa penerimaan, penggunaan, dan keterlibatan dalam keberlangsungan layanan. Sementara itu, kiai berkontribusi melalui sumber daya sosial (*social resources*) berupa kepercayaan, kedekatan sosial, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan informasi program lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, perbedaan sumber daya tersebut tidak menciptakan persaingan fungsi antaraktor, tetapi membentuk hubungan yang saling melengkapi, di mana setiap aktor memberikan kontribusi berdasarkan kapasitas yang dimilikinya dalam mendukung proses *public service delivery*.

Temuan Panempan menguatkan penelitian Husein dan Roziq (2021) mengenai posisi kiai sebagai pemimpin lokal informal, tetapi memperlihatkan fungsi yang berbeda. Jika studi tersebut menempatkan kiai dalam proses pembangunan desa, penelitian Panempan menunjukkan bahwa otoritas sosial kiai juga dapat menjadi sumber daya dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun, sumber daya tersebut tidak berbentuk kewenangan administratif, melainkan kepercayaan, kedekatan sosial, dan akses terhadap jaringan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Husein dan Roziq (2021) yang melihat kiai terutama sebagai pemimpin lokal informal dalam proses pembangunan desa, penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas sosial kiai juga bekerja dalam arena layanan publik melalui mekanisme komunikasi dan penerimaan layanan. Jika penelitian sebelumnya lebih menempatkan kiai dalam konteks kepemimpinan lokal dan pembangunan, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa sumber daya sosial kiai dapat menjadi bagian dari jaringan penyelenggaraan layanan publik dalam perspektif *New Public Governance*.

Networks: Jaringan Sosial sebagai Bagian dari Tata Kelola Layanan Publik

Selain keberagaman aktor, *New Public Governance* juga menekankan pentingnya jaringan (*networks*) dalam penyelenggaraan layanan publik. Stephen Osborne (2010) menjelaskan bahwa hubungan antaraktor menjadi aspek penting karena pelayanan publik berlangsung melalui interaksi, komunikasi, dan pertukaran sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial menjadi salah satu mekanisme yang digunakan dalam penyampaian informasi layanan sampah di Desa Panempan. Pemerintah desa tidak hanya menggunakan jalur formal melalui perangkat pemerintahan, tetapi juga memanfaatkan hubungan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Penggunaan ruang sosial seperti pengajian dan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa jaringan layanan publik tidak selalu berjalan melalui struktur birokrasi. Informasi mengenai program dapat bergerak melalui hubungan antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga.

Dalam perspektif *New Public Governance*, kondisi tersebut menggambarkan bahwa layanan publik berlangsung dalam lingkungan jaringan, bukan hanya dalam hubungan hierarkis. Pemerintah desa tetap menjadi institusi formal yang bertanggung jawab terhadap layanan, tetapi pelaksanaan layanan dipengaruhi oleh kemampuan membangun hubungan dengan aktor yang memiliki akses sosial kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian Osborne et al. (2021) yang menjelaskan bahwa layanan publik modern berkembang melalui hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Nilai layanan tidak hanya dihasilkan oleh organisasi penyedia, tetapi juga melalui interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari proses pelayanan. Dalam kasus Panempan, kiai menjadi salah satu titik hubungan dalam jaringan sosial masyarakat. Keberadaan kiai memungkinkan informasi program publik bergerak melalui hubungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun, hubungan tersebut bukan

hubungan kewenangan, melainkan hubungan sosial yang mendukung proses komunikasi layanan.

Penelitian mengenai kiai di Madura sebelumnya menunjukkan bahwa jaringan sosial dan otoritas kiai dapat bekerja dalam arena politik lokal, termasuk dalam pemilihan kepala desa (Husein & Saputri, 2019; Roziq & Husein, 2021). Kasus Panempan memperlihatkan fungsi jaringan yang berbeda. Jaringan sosial-keagamaan tidak digunakan untuk mobilisasi politik, tetapi menjadi saluran yang memungkinkan informasi layanan publik bergerak dari institusi formal menuju masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial kiai bersifat lintas-arena: sumber daya relasional yang sebelumnya banyak dikaji dalam politik lokal juga dapat bekerja dalam konteks *public service delivery*.

Public Service Delivery: Layanan Publik sebagai Proses Interaksi

Perspektif *New Public Governance* melihat *public service delivery* sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Layanan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, fasilitas, atau prosedur administratif, tetapi juga oleh bagaimana informasi layanan diterima, dipahami, dan diterjemahkan menjadi tindakan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan sampah desa, pemerintah desa dan pengelola layanan memiliki peran utama dalam menyediakan sistem pelayanan, tetapi keberlanjutan layanan bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memahami mekanisme layanan dan berpartisipasi sebagai pengguna.

Hasil penelitian di Desa Panempan menunjukkan bahwa proses *public service delivery* berlangsung melalui kombinasi antara aspek administratif dan aspek sosial. Aspek administratif dijalankan oleh pemerintah desa dan BUMDes Delta Mulia melalui pengelolaan program, penyediaan fasilitas, dan pelaksanaan operasional layanan. Sementara itu, aspek sosial berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh informasi, membangun pemahaman, dan menerima

keberadaan layanan tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan kiai tidak hanya dipahami sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menghubungkan penyedia layanan dengan masyarakat pengguna.

Kiai berperan dalam proses *service delivery* karena memiliki *social authority* yang terbentuk melalui hubungan kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Ketika informasi mengenai program layanan disampaikan melalui jaringan sosial yang telah dipercaya masyarakat, informasi tersebut tidak hanya berpindah secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan melalui aktor informal menjadi mekanisme yang membantu proses penerimaan layanan oleh masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyampaian layanan publik desa tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan layanan, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat memahami dan menggunakan layanan tersebut.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai *public service delivery* dalam perspektif *New Public Governance*. Proses pelayanan publik tidak hanya berlangsung melalui hubungan langsung antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga melalui jaringan aktor yang memiliki sumber daya berbeda. Dalam kasus Panempan, kiai tidak menjadi penyedia layanan maupun pengambil keputusan, tetapi berperan sebagai penghubung sosial yang membantu mempertemukan kapasitas formal pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dapat menjadi bagian dari mekanisme pelayanan publik, khususnya pada layanan seperti pengelolaan sampah yang membutuhkan perubahan perilaku dan keterlibatan pengguna.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *public service logic* yang menjelaskan bahwa nilai layanan publik terbentuk melalui interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan, bukan

hanya melalui tindakan organisasi penyedia (Osborne et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, interaksi tersebut diperluas dengan menunjukkan bahwa aktor informal dapat menjadi bagian dari proses pembentukan nilai layanan melalui jaringan sosial yang dimilikinya.

Kajian layanan publik desa umumnya memperlihatkan pentingnya kapasitas pemerintah, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan. Rohman & Bagus (2026) misalnya, menempatkan persoalan pelayanan publik dalam konteks etika dan tata kelola pemerintahan desa, sedangkan Said et al. (2026) menunjukkan dinamika *governance* dalam penyediaan layanan air bersih. Temuan Panempan menambahkan dimensi yang berbeda dengan memperlihatkan adanya aktor yang tidak memiliki tanggung jawab penyediaan layanan, tetapi tetap berkontribusi pada proses layanan melalui fungsi sosialnya. Kiai tidak menyediakan maupun mengangkut sampah, tetapi membantu proses penyampaian informasi dan penerimaan masyarakat terhadap sistem pelayanan.

Posisi Aktor Informal dalam Tata Kelola Layanan Publik Desa

Temuan penelitian memberikan pemahaman bahwa aktor informal memiliki posisi tertentu dalam tata kelola layanan publik desa. Kiai tidak dapat dipahami sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, tetapi sebagai aktor sosial yang berada dalam jaringan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam layanan pengelolaan sampah tidak semata-mata berada pada fungsi penyampaian informasi, tetapi berkaitan dengan sumber daya sosial yang melekat pada posisi kiai dalam masyarakat. Berbeda dengan perangkat desa, RT/RW, atau pengelola layanan yang menjalankan peran berdasarkan kewenangan administratif dan struktur organisasi formal, kiai memiliki legitimasi sosial yang terbentuk melalui hubungan keagamaan, kedekatan sosial, dan interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan dengan masyarakat. Legitimasi tersebut membuat pesan

yang disampaikan kiai tidak hanya dipahami sebagai informasi program pemerintah, tetapi juga memperoleh penerimaan karena didukung oleh hubungan kepercayaan (*trust relationship*) antara kiai dan masyarakat. Dalam konteks Desa Panempan, jaringan sosial-keagamaan seperti kegiatan pengajian tidak hanya berfungsi sebagai ruang keagamaan, tetapi juga menjadi jaringan komunikasi yang telah memiliki audiens, rutinitas, dan penerimaan sosial sehingga dapat digunakan sebagai saluran penyampaian informasi layanan publik. Dengan demikian, posisi kiai dalam tata kelola layanan publik tidak terletak pada kewenangan untuk mengelola layanan sampah, melainkan pada kemampuannya menjadi mediator sosial yang menghubungkan institusi formal dengan masyarakat melalui sumber daya berupa legitimasi sosial, kepercayaan, dan jaringan komunikasi yang telah tertanam dalam komunitas. Dalam perspektif *New Public Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa batas antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka. Pemerintah tetap menjalankan fungsi formal, tetapi proses penyelenggaraan layanan membutuhkan hubungan dengan aktor lain yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat. Studi ini berbeda dari sebagian penelitian layanan publik desa yang lebih banyak menempatkan pemerintah atau organisasi formal sebagai pusat analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor informal juga menjadi bagian dari lingkungan layanan publik karena memiliki hubungan sosial yang dapat mendukung proses komunikasi dan penerimaan masyarakat. Namun, keterlibatan aktor informal memiliki batas. Keberadaan kiai tidak menghilangkan kebutuhan terhadap kapasitas organisasi formal. Pengelolaan layanan tetap membutuhkan sistem administrasi, pengelolaan operasional, dan kelembagaan pelayanan yang jelas. Dengan demikian, hubungan antara aktor formal dan informal lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam proses tata kelola layanan publik.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian *New Public Governance* dengan memperlihatkan bagaimana perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami layanan publik pada tingkat desa. Studi ini menunjukkan bahwa konsep *multiple actors*, *networks*, dan *public service delivery* tidak hanya relevan dalam konteks organisasi besar atau hubungan antarinstansi, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sosial dalam pelayanan publik desa. Kasus Desa Panempan memperlihatkan bahwa layanan publik desa berlangsung melalui kombinasi antara kapasitas institusi formal dan keberadaan aktor informal yang memiliki posisi dalam jaringan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kiai menjadi contoh bagaimana aktor lokal di luar pemerintah dapat menjadi bagian dari proses *governance* tanpa mengambil alih fungsi negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa memahami layanan publik desa membutuhkan perhatian terhadap siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana jaringan hubungan terbentuk, dan bagaimana layanan diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kiai sebagai aktor informal dalam tata kelola layanan publik pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Panempan, Pamekasan melalui perspektif *New Public Governance* (Stephen Osborne 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai berperan sebagai aktor informal yang berfungsi sebagai penghubung sosial (*social intermediary*) antara pemerintah desa, pengelola layanan, dan masyarakat pengguna layanan. Peran tersebut muncul karena kiai memiliki *social authority* berupa hubungan kepercayaan, kedekatan sosial, dan jaringan komunikasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menemukan tiga bentuk peran kiai dalam proses tata kelola layanan pengelolaan sampah. Pertama, kiai berperan sebagai saluran komunikasi informal yang membantu menyampaikan informasi

mengenai program layanan publik kepada masyarakat melalui jaringan sosial dan kegiatan keagamaan. Kedua, kiai berperan dalam membangun penerimaan sosial terhadap program layanan melalui hubungan kepercayaan yang dimilikinya, sehingga informasi mengenai program lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ketiga, kiai berperan sebagai penghubung antara institusi formal dan masyarakat dengan membantu mempertemukan kewenangan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran kiai memiliki batas yang jelas. Kiai tidak berperan dalam pengambilan keputusan administratif, penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan fasilitas TPS3R, maupun operasional pengangkutan sampah. Fungsi tersebut tetap berada pada pemerintah desa dan BUMDes Delta Mulia sebagai institusi formal penyelenggara layanan. Dengan demikian, kontribusi kiai bukan sebagai pengganti pemerintah atau pengelola layanan, tetapi sebagai aktor informal yang menyediakan sumber daya sosial untuk mendukung proses *public service delivery*.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif *New Public Governance*, layanan publik desa terbentuk melalui kombinasi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai aktor. Pemerintah desa menyediakan kewenangan formal, BUMDes menyediakan kapasitas teknis, masyarakat menyediakan partisipasi sebagai pengguna layanan, sedangkan kiai menyediakan *social authority* yang mendukung komunikasi dan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial aktor informal merupakan bagian penting dalam tata kelola layanan publik desa, khususnya pada layanan pengelolaan sampah yang membutuhkan perubahan perilaku dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran aktor informal memiliki batas. Kiai tidak menggantikan fungsi pemerintah

desa dan tidak menjadi pengelola layanan sampah. Keberadaan aktor informal perlu dipahami sebagai bagian dari jaringan pelayanan yang mendukung fungsi institusi formal. Penyelenggaraan layanan publik tetap membutuhkan kapasitas administratif pemerintah, kelembagaan pengelola, serta partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah desa perlu memperhatikan keberadaan aktor lokal yang memiliki hubungan sosial dengan masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Pemanfaatan jaringan sosial lokal dapat menjadi salah satu strategi komunikasi layanan, terutama dalam konteks masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang kuat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai bagaimana variasi aktor informal di berbagai wilayah memengaruhi proses penyelenggaraan layanan publik desa. Studi komparatif antarwilayah juga diperlukan untuk memahami apakah pola keterlibatan aktor informal seperti yang ditemukan di Desa Panempun muncul dalam konteks sosial masyarakat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 16, Number 6). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Hidayat, F. A., & Warsono, H. (2020). MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DELTA MULIA DI DESA PANEMPUN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 27-38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.189>
- Husein, M. B. (2018). Keterlibatan Kyai Sebagai Peserta Pilkada Pamekasan Tahun 2018. 3(1), 28-34. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/view/330
- Husein, M. B., & Roziq, A. (2021). PERANAN KYAI SEBAGAI PEMIMPIN LOKAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA LARANGAN LUAR. 11, 120-129. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Husein, M. B., & Saputri, E. (2019). the Participation of Kyai in the Election of the Headman in Bulangan Haji Village, Regency of Pamekasan, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 95(11), 122-126. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-11.15>
- Novatsiani Pa Padja, Riska Supriyati, & Supriyati. (2021). Protestant religious leaders' role in supporting reduce-reuse-recycle community practices in Kupang City. 37, 2021. <https://doi.org/10.22146/bkm.v37i04.1676>
- Lubis, H., & Rohmatillah, N. (2018). Komodifikasi Otoritas Kiai Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 57-64.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Osborne, S. P., Powell, M., Cui, T., & Strokosch, K. (2021). New development: 'Appreciate-Engage-Facilitate'—The role of public managers in value creation in public service ecosystems. *Public Money and Management*, 41(8), 668-671. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1916189>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. 22-25.
- Pailan. (2015). The Implementation Of Policy And Rural Fund Allocation In Ringinrejo County. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2).
- Rika Syahadatina, Rohmaniyah, Syaiful, & Selvia Vaura. (2023). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

- PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1).
- Rohman, A., & Bagus, N. (2026). Etika Pelayanan Publik dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian>
- Roziq, A., & Husein, M. B. (2021). the Role of Kyai As a Local Leader in the Election of Village Head At Larangan Luar Village in 2019. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 112(4), 32–37. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-04.04>
- Setiawan, F., & Rhama, B. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA CITAMAN JERNIH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 05).
- Stephen Osborne. (2010). *THE NEW PUBLIC GOVERNANCE?* Routledge Taylor & Francis e-Library.
- Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. *Unisia*, 30(65), 264–276. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art5>